Proses Pengawasan Kesesuaian Prinsip Syariah (*Syariah Compliance*) dalam Praktek *Crowdfunding non-profit* di Platform Kitabisa.Com

Hendri Kurniawan¹, Abdul Mujib²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: Kurniawanlc2910@gmail.com, Abdul.mujib@uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi diskrepansi antara fatwa DSN-MUI tentang akad *ijārah* dan praktik akad yang diterapkan oleh platform *crowdfunding non-profit* Kitabisa.com dalam pengumpulan dana sosial digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap dokumen fatwa, kebijakan platform, dan literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *ijārah* dalam pengelolaan dana sosial digital di Kitabisa.com tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* dalam fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal kejelasan objek manfaat, *ujrah*, dan waktu akad. Selain itu, akad *ijārah* dianggap kurang relevan untuk digunakan dalam konteks penghimpunan dana sosial yang bersifat *tabarru'*, karena lebih cocok untuk transaksi komersial. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan *gharar*, mengurangi transparansi, dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap platform. Sebagai alternatif, penelitian ini merekomendasikan penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* dan *tabarru'* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan filantropi sosial. Penyesuaian akad dan regulasi yang responsif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah digital di Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Akad *Ijārah*, *Crowdfunding* Sosial Digital

Abstract

This study explores the discrepancy between the DSN-MUI fatwa on the ijārah contract and the contract practices applied by the non-profit crowdfunding platform Kitabisa.com in digital social fundraising in Indonesia. The method used in this study is a qualitative approach with content analysis of fatwa documents, platform policies, and relevant literature. The findings of this study indicate that the application of the ijārah contract in the management of digital social funds on Kitabisa.com is not fully in accordance with the principles and conditions of ijarah according to the DSN-MUI fatwa, particularly regarding the clarity of the object of benefit, ujarah, and the timing of the contract. Additionally, the ijārah contract is considered less relevant for use in the context of social fund collection, which is of a tabarru' nature, as it is more suitable for commercial transactions. This inconsistency has the potential to cause gharar, reduce transparency, and diminish public trust in the platform. As an alternative, this study recommends the application of the wakālah bi al-ujrah and tabarru' contracts, which are more consistent with Sharia principles and the objectives of social philanthropy. Adjustments to the contracts and responsive regulations are essential to ensure Sharia compliance, enhance public trust, and strengthen the digital Sharia economy ecosystem in Indonesia.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Ijārah Contract, Digital Social Crowdfunding*

PENDAHULUAN

Perkembangan *crowdfunding* sosial digital di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara masyarakat berdinamika, berkomunikasi dan berpartisipasi pada kegiatan sosial. Platform digital seperti Kitabisa.com merupakan contoh konkret bagaimana ruang partisipatif yang terbuka dan inklusif dapat diwujudkan dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta secara langsung dalam mendukung berbagai isu sosial melalui mekanisme penggalangan dana secara *online*.(Nurhamdani, Asyifa Khumaira.Charis, Jessica Caroline. Gabriella, 2024) Fenomena ini semakin diperkuat oleh hadirnya teknologi keuangan (*fintech*) yang menawarkan solusi yang efisien dan inovatif dalam mengakses serta mengelola layanan keuangan termasuk penggalangan dana secara kolektif. *Crowdfunding* kini memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif sosial melalui kontribusi daring sehingga memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan filantropi dan solidaritas sosial.

Pertumbuhan *crowdfunding* syariah menunjukkan tren yang menggembirakan, menawarkan alternatif layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Sejak mulai dikenal pada tahun 2009, *crowdfunding* syariah di Indonesia telah berkembang dalam berbagai model, seperti berbasis sumbangan (*donation-based*), berbasis imbalan (*reward-based*), berbasis aset (*asset-based*), dan berbasis ekuitas (*equity-based*). Namun, tantangan yang dihadapi ke depan masih cukup signifikan, termasuk masalah kepercayaan masyarakat, inovasi dalam akad dan juga integrasi dengan institusi keuangan lainnya.(Nelly et al., 2022) *Crowdfunding* sosial digital telah menjadi pilar penting dalam memperkuat partisipasi publik, memperluas akses keuangan, dan mendukung gerakan sosial di Indonesia, meskipun dalam praktiknya tetap membutuhkan inovasi regulasi dan penguatan tata kelola agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam platform penggalangan dana sosial sangat krusial untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip. Hal ini mencakup larangan terhadap elemen riba, *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian) serta mengawasi bahwa dana yang terhimpun dialokasikan untuk tujuan yang halal dan sesuai dengan syariat.(Umardani, 2021) Kepatuhan terhadap syariah juga memberikan kepastian kepada para donatur dan penerima manfaat bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya legal menurut hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan bebas dari praktik yang dilarang oleh agama. Selain hal tersebut, penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform *crowdfunding* sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam kegiatan filantropi digital.(Rasad Musfik R et al., 2023) Platform-platform yang berkembang di Indonesia seperti Kitabisa.com telah menerapkan berbagai metode untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, mulai dari proses verifikasi kampanye hingga pemilihan tujuan donasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, permasalahan yang terjadi masih

tetap kompleks dan memerlukan adanya perhatian, terutama dalam memastikan bahwa setiap akad dan mekanisme bisnis yang diterapkan telah benar-benar selaras dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah secara substansial, bukan hanya secara administratif. (A. F. Aprilio & Utami, 2024)

Sejumlah penelitian telah menganalisis kepatuhan terhadap syariah serta pelaksanaan akad dalam layanan keuangan digital, terutama dalam ranah *crowdfunding* dan *fintech* syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Indriana et al. (2022), Setiawan et al. (2023), dan Nurhaidah & Batubara (2023) menekankan signifikansi penerapan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dalam bisnis digital, mencakup aspek keadilan, transparansi informasi, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan pedoman yang diatur oleh fatwa DSN-MUI mengenai operasional bisnis daring (Zuheri & Ghozali, 2025) Namun sebagian besar penelitian ini lebih berfokus pada *e-commerce* dan belum secara mendalam membahas permasalahan akad dalam penggalangan dana sosial. Selain itu, penelitian yang dilakukan terkait praktik akad dalam *fintech* syariah, seperti yang terobservasi pada platform Dana Syariah menunjukkan adanya ketidakcocokan antara akad yang diterapkan (*murābahah* dan *wakālah bi al-ujrah*) dengan prinsip-prinsip syariah yang telah putuskan oleh fatwa DSN-MUI. Ketidakcocokan ini dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum dan etika dalam praktik keuangan syariah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya verifikasi dan penyesuaian akad untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Islam dalam praktik *crowdfunding* syariah (Fahrunisah & Nafisah, 2023).

Temuan ini penting untuk konteks Kitabisa.com, di mana perjanjian yang diterapkan juga berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, literatur mengenai *equity crowdfunding* syariah menekankan bahwa model *crowdfunding* syariah yang ideal harus mematuhi prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dengan perjanjian yang jelas seperti *musyārahah* dan semangat *ta'āwun* (tolong-menolong). (Tripalupi, 2019) Penelitian ini juga menekankan pentingnya penetapan akad yang tepat agar tidak terjadi kebingungan antara tujuan sosial dan mekanisme bisnis komersial. Secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya spesifikasi akad yang sesuai dengan konteks, transparansi, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dalam setiap inovasi layanan keuangan digital, termasuk *crowdfunding* sosial. Namun, studi yang secara khusus menganalisis perbedaan antara fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijārah* dan praktik di platform *crowdfunding non-profit* seperti Kitabisa.com masih sangat terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Isu sentral dalam penelitian ini adalah bagaimana diskrepansi antara ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijārah* dan praktik yang dilakukan oleh platform *crowdfunding non-profit* seperti Kitabisa.com. Perbedaan ini muncul karena fatwa DSN-MUI yang tercatat dalam Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004, mengharuskan adanya kejelasan mengenai manfaat, *ujrah* (imbalan), waktu, serta objek akad yang spesifik. Namun, Kitabisa.com menerapkan skema pengambilan *fee* dari dana donasi dengan dasar akad *ijārah*, meskipun objek dan tujuannya lebih bersifat *tabarru'* (kebakikan) daripada

pertukaran jasa secara komersial. Masalah ini juga mirip dengan temuan di sektor lain yang menunjukkan bahwa akad *ijārah* tidak memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, seperti ketidakjelasan objek, waktu, dan *ujrah* yang dapat mengakibatkan akad dianggap cacat atau batal secara syariah.(Ramdhani et al., 2023) Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada "apa diskrepansi antara fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijārah* dan praktik akad yang diterapkan oleh Kitabisa.com dalam penggalangan dana sosial serta dampaknya terhadap kepatuhan syariah dalam *crowdfunding non-profit* digital?"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam diskrepansi yang terjadi antara ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad *ijārah* dan praktik akad yang diterapkan oleh platform *crowdfunding non-profit* Kitabisa.com dalam penggalangan dana sosial digital. Dengan menyoroti aspek ketidaksesuaian konteks akad yang digunakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis berupa pemetaan isu-isu akad dalam praktik *crowdfunding* sosial serta menawarkan rekomendasi spesifikasi akad yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara praktis dengan memberikan masukan bagi regulator, pengelola platform, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis makna, tema, serta pola yang muncul dari dokumen, teks, atau data yang berkaitan dengan permasalahan ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dan praktik akad di platform *crowdfunding non-profit* seperti Kitabisa.com. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengeksplorasi keterkaitan antar konsep, memahami konteks sosial dan norma yang ada serta menginterpretasikan makna di balik praktik akad yang dilakukan oleh platform digital tersebut.(Gkevrou & Stamovlasis, 2022).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang mencakup fatwa DSN-MUI, dokumen kebijakan serta ketentuan dari platform Kitabisa.com, serta literatur yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara sistematis melalui langkah-langkah seperti reduksi data, pengelompokan tema, penafsiran makna, dan penyampaian hasil analisis. Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan interpretasi mendalam terhadap data yang telah diteliti.(Im et al., 2023) Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan dinamis, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Praktik Akad di Kitabisa.com

Skema pengumpulan dana di Kitabisa.com dimulai dengan inisiasi kampanye oleh individu, kelompok, atau organisasi yang bertujuan untuk menggalang dana bagi kepentingan sosial tertentu. Platform ini memudahkan proses pengumpulan dana secara daring, menawarkan berbagai metode pembayaran, serta fitur untuk membagikan kampanye di media sosial agar dapat memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat. Setelah dana terkumpul, Kitabisa.com melaksanakan proses verifikasi dan pengawasan untuk menjamin transparansi dan keamanan penyaluran dana kepada penerima manfaat. (A. F. F. U. Aprilio., 2024) Terkait dengan mekanisme biaya (*fee*), Kitabisa.com menerapkan pemotongan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi yang berhasil terkumpul. Biaya ini langsung diambil dari dana donasi sebelum disalurkan kepada penerima manfaat dan menjadi tanggung jawab donatur, bukan pemilik kampanye. Apabila kampanye tidak mendapatkan donasi selama periode promosi, maka tidak ada biaya administrasi yang dikenakan. Namun, detail mengenai biaya sewa dan batasan waktu penggunaan platform tidak dijelaskan secara rinci di awal, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna. (Fikriawan, 2018) Pada dasarnya, Kitabisa.com telah berupaya memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, spekulasi, maupun praktik yang dilarang. Namun, aspek transparansi mengenai detail biaya jasa dan akad yang digunakan masih menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan hasil studi dan analisis hukum terkait bisnis Islam, Kitabisa.com dalam pelaksanaannya menerapkan akad *ijārah* (sewa-menyewa) sebagai dasar perjanjian antara pemilik kampanye (*campaign owner*) dan Kitabisa sebagai penyedia platform. Dalam model ini, Kitabisa.com berfungsi sebagai pihak yang "menyewakan" layanan platform digital kepada pemilik kampanye dengan imbalan berupa biaya (*fee*) jasa sebesar 5% yang diambil dari total donasi yang terkumpul dan dibebankan kepada para donatur. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah biaya sewa dan durasi penggunaan platform tidak dijelaskan dengan jelas sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian (*gharar*) dalam perjanjian tersebut.^{ibid.} Di samping akad *ijārah*, terdapat pandangan dalam literatur keuangan syariah yang menyatakan bahwa akad *wakālah* (perwakilan) bisa menjadi pilihan yang lebih tepat untuk pengelolaan dana sosial, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. (Fauziah et al., 2023) Namun, hingga saat ini, Kitabisa.com secara umum masih mengacu pada akad *ijarah* dalam mekanisme pengambilan *fee* layanan pada penggalangan dana sosial digital. (Fikriawan, 2018)

Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Ijārah*

Rukun dan syarat dalam akad *ijārah* menurut fatwa DSN-MUI mencakup beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut diakui sah menurut syariah. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 mengenai Pembiayaan

Ijārah serta Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah* terdiri dari hal-hal berikut:(Suliyono et al., 2024)

1. Rukun *ijārah*:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa),
- b. Objek akad (manfaat barang atau jasa yang disewakan),
- c. *Ujrah* (upah sewa), upah tersebut harus diketahui dengan jelas jumlahnya dalam bentuk nominal bukan persentase,(Efriadi, 2023)
- d. *Sīghat* (ijab qabul atau pernyataan akad).

2. Syarat *ijārah*:

- a. Manfaat atau jasa yang disewakan harus jelas, spesifik, dan dapat diserahterimakan.
- b. *Ujrah* harus diketahui secara pasti di awal akad, baik bentuk maupun nominalnya, dan tidak boleh dikaitkan dengan nilai pokok atau jumlah pinjaman.
- c. Waktu sewa harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.
- d. Pihak yang menyewakan harus benar-benar memiliki kemampuan untuk menyediakan manfaat atau jasa yang dijanjikan.
- e. Tidak boleh ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba, atau spekulasi dalam akad.

Jika salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *ijārah* dianggap tidak sah menurut fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kejelasan objek, *ujrah*, atau waktu sering menjadi sumber permasalahan dalam penerapan akad *ijārah* di berbagai sektor termasuk pada layanan digital dan pengelolaan dana sosial.

Praktik akad *ijārah* di Kitabisa.com menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *ijārah* harus memenuhi syarat kejelasan objek manfaat atau jasa, transparansi *ujrah* (biaya), serta kejelasan waktu akad. Namun dalam praktiknya, Kitabisa.com memotong biaya sebesar 5% dari total donasi sebagai biaya penggunaan platform sementara nominal biaya sewa dan batasan waktu penggunaan platform tidak dijelaskan secara transparan di awal. Hal ini berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang menurut beberapa penelitian dapat mengakibatkan akad dianggap cacat atau batal secara syariah jika tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, seperti kejelasan manfaat, *ujrah*, dan waktu.(Ayunin, 2023) Selain hal tersebut, akad *ijārah* menurut fatwa DSN-MUI biasanya ditujukan untuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran manfaat jasa yang jelas. Sementara itu, penggalangan dana sosial di Kitabisa.com lebih bersifat *tabarru'* (kebaikan) sehingga penerapan akad *ijārah* dalam konteks ini kurang tepat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip transparansi *ujrah* dan kejelasan manfaat dalam akad *ijārah* sering terjadi di berbagai lembaga yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI (Ramdhani et al., 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan akad *ijārah* yang dilakukan oleh Kitabisa.com masih belum sepenuhnya sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek transparansi, kejelasan mengenai objek akad, serta kesesuaian antara konteks akad dengan tujuan sosial yang bersifat *non-profit*.

Diskrepansi dan Problematika

Beberapa elemen penting yang tidak sejalan dengan konteks dalam penerapan akad *ijārah* pada platform *crowdfunding* sosial seperti Kitabisa.com dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Objek akad

Dalam akad *ijārah*, objek yang disewakan harus berupa manfaat dari barang atau jasa yang terukur dan terperinci, seperti layanan pengelolaan atau penggunaan aset tertentu.(Artado, 2023) Namun, praktik di platform Kitabisa.com, biaya diambil dari dana donasi tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai manfaat spesifik yang diperoleh oleh donatur atau penerima manfaat dari layanan platform tersebut. Situasi ini mirip dengan temuan pada kasus pembiayaan di BUMDes di mana *ijārah* diterapkan pada penyerahan uang bukan pada manfaat jasa atau barang sehingga akad menjadi tidak sesuai konteks.(Suhadi, 2021)

2. Sumber pembiayaan atau dana

Pembiayaan dalam *crowdfunding* sosial diperoleh dari sumbangan masyarakat yang bersifat *tabarru'* (sukarela) bukan dari dana yang bersifat komersial atau investasi. Prinsip akad *ijārah* lebih sesuai diterapkan pada transaksi komersial yang melibatkan pertukaran manfaat jasa yang jelas dan bukan untuk pengelolaan dana sosial yang bersifat sukarela.(Artado, 2023)

3. Tujuan akad

Tujuan pokok dari akad *ijārah* adalah pertukaran manfaat layanan dengan imbalan tertentu, sementara tujuan utama dari *crowdfunding* sosial adalah pengumpulan dana untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Penerapan akad *ijārah* dalam konteks ini menciptakan kebingungan antara tujuan sosial (*tabarru'*) dan mekanisme bisnis komersial, sehingga tidak sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah* serta prinsip-prinsip filantropi dalam Islam.

4. Kejelasan *ujrah* dan waktu

Fatwa DSN-MUI mengharuskan adanya kejelasan mengenai *ujrah* (biaya) serta waktu akad yang jelas. Namun, dalam praktiknya Kitabisa.com tidak memberikan penjelasan yang transparan mengenai jumlah biaya (*fee*) dan batas waktu penggunaan platform, sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam hukum syariah.(Haerullah et al., 2021) *Gharar* yang terjadi bemula dari upah yang diambil oleh platform berupa persentase bukan nominal yang jelas. Namun, jika ternyata upah berupa persentase itu dibolehkan, namun terdapat hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana jika dalam pelaksanaannya penggalang dana tidak mendapatkan donatur, maka platform juga tidak akan mendapatkan upah sehingga akad *ijārah* menjadi batal.

Berdasarkan analisis di atas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan akad *ijārah* dalam dana sosial *non-profit* seperti *crowdfunding* di Kitabisa.com yang menimbulkan sejumlah implikasi syariah dan etika yang signifikan. Menurut syariah, penggunaan akad *ijārah* dalam dana sosial *non-profit* dapat berpotensi dianggap tidak sah menurut syariah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Ketidakjelasan mengenai manfaat jasa yang diberikan kepada donatur

atau penerima manfaat serta kurangnya transparansi mengenai *fee* dapat menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam syariah. Selain itu, penerapan akad *ijārah* untuk dana sosial yang bersifat *tabarru'* juga tidak selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah*, karena akad ini lebih sesuai untuk transaksi komersial ketimbang filantropi. Apabila akad dianggap tidak sah, maka transaksi yang terjadi berisiko batal dan dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun secara etika, pengambilan biaya dari dana donasi sosial tanpa adanya kejelasan mengenai manfaat layanan dan tanpa persetujuan yang jelas dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Situasi ini juga dapat menciptakan pandangan negatif bahwa sebagian dari dana sosial yang seharusnya sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat justru dipergunakan untuk kepentingan operasional platform dengan cara yang tidak seimbang. Praktik semacam ini berisiko menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi digital dan merusak semangat keikhlasan dalam beramal. Oleh karena itu, penerapan akad *ijārah* dalam dana sosial *non-profit* tanpa memperhatikan prinsip syariah dan etika dapat menyebabkan masalah hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menghalangi pertumbuhan ekosistem *crowdfunding* sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Perbandingan antara akad *ijārah* dan akad lain yang lebih relevan, seperti *wakālah bi al-ujrah* dan *tabarru'* dalam praktik *crowdfunding* sosial digital menunjukkan keunggulan dalam hal kesesuaian konteks, kepatuhan terhadap syariah, serta transparansi. Akad *wakālah bi al-ujrah* lebih tepat diterapkan pada platform penggalangan dana sosial karena posisi platform sebagai *wakīl* (agen) yang diberi kuasa oleh donatur untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat dengan imbalan jasa (*ujrah*) yang jelas dan transparan. Penelitian oleh Syarifuddin (2024) di Yayasan Kebaikan Ummat menunjukkan bahwa penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* dalam pengelolaan donasi *online* dianggap sah menurut syariah, asalkan *fee* ditentukan dengan transparan dan tidak merugikan hak penerima manfaat. Dalam penelitian tersebut, proses penggalangan dana melibatkan beberapa akad seperti *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *ju'alah*, namun fokus utama adalah pada kejelasan peran, *fee*, dan mekanisme penyaluran dana. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa pengintegrasian akad *tabarru'* sebagai dasar pemberian dana memastikan bahwa seluruh proses tetap dalam kerangka filantropi Islam dan *maqāshid al-syarī'ah*. (Apriliani & Susilawati, 2024) Sementara itu, akad *tabarru'* menjadi dasar utama dalam pengumpulan dana sosial, di mana para donatur memberikan kontribusi secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Akad ini sangat relevan untuk tujuan sosial dan filantropi serta menjamin bahwa seluruh dana yang terkumpul digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penerima manfaat. Oleh karena itu, akad *wakālah bi al-ujrah* dan *tabarru'* lebih cocok diterapkan dalam model *crowdfunding* sosial *non-profit* dibandingkan dengan akad *ijārah*. Hal ini disebabkan karena keduanya lebih menekankan pada transparansi, kejelasan dalam peran, serta tujuan sosial, dan juga menghindari kebingungan antara transaksi komersial dan kegiatan filantropi.

Tabel 1. perbandingan

Aspek	<i>Ijārah</i>	<i>Wakālah bi al-Ujrah</i>	<i>Tabarru'</i>
Jenis Akad	Komersial (<i>mu'āwadhah</i>)	Komersial (<i>mu'āwadhah</i>), namun bersifat amanah	Sosial
Tujuan Akad	Komersial- pertukaran manfaat dengan kompensasi	Perwakilan-delegasi distribusi dana	Sosial-kebaikan dan filantropi
Subjek Pihak	Penyewa (<i>musta'jir</i>) & pemberi jasa (<i>mu'jir</i>)	Donatur (<i>muwakkil</i>) & platform (<i>wakīl</i>)	Donatur dan penerima manfaat
Objek Akad	Manfaat dari jasa atau layanan	Tindakan atau tugas yang diwakilkan	Dana/sumbangan yang diberikan secara sukarela
<i>Ujrah</i> (imbalan)	Harus ditentukan jelas diawal akad & wajib berupa nominal atau manfaat yang jelas	Harus ditentukan dan disepakati sebelum akad berlangsung dengan syarat transparan	Tidak ada-bersipat ikhlas tanpa imbalan
Kesesuaian untuk <i>crowdfunding</i> sosial	Kurang tepat: berbasis pertukaran jasa, berisiko menimbulkan <i>gharar</i>	Tepat: sesuai untuk skema distribusi dana melalui platform	Sangat tepat: sesuai dengan tujuan sosial donasi
Risiko Syari'ah	<i>Gharar</i> jika manfaat, waktu atau <i>ujrah</i> tidak dijelaskan secara rinci	Dapat diterima jika <i>fee</i> dan tugas dijelaskan dengan jelas	Umumnya minim risiko karena tidak ada transaksi imbalan

Sumber: Data diolah

Urgensi Spesifikasi Akad yang Tepat

Penentuan akad yang tepat dalam *crowdfunding* sosial digital sangat krusial untuk menjamin kepatuhan syariah, transparansi, serta perlindungan hak semua pihak yang terlibat. Akad yang sesuai tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi setiap transaksi, tetapi juga mencegah terjadinya *gharar*, *riba*, dan praktik yang tidak etis dalam pengelolaan dana sosial. Dalam konteks *crowdfunding* sosial, penerapan akad yang tidak sesuai, seperti *ijārah* pada dana donasi dapat menyebabkan kerancuan hukum dan etika, mengingat akad *ijārah* lebih relevan untuk transaksi komersial ketimbang filantropi. Di sisi lain, penetapan akad seperti *wakālah bi al-ujrah* atau *tabarru'* lebih sesuai dan kontekstual dengan tujuan sosial penggalangan dana, di mana platform berperan sebagai agen yang menyalurkan dana atau sebagai fasilitator kebaikan tanpa motif komersial yang utama. Akad yang tepat juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh dana yang terkumpul benar-

benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat sesuai dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*.

Penetapan akad yang sesuai dan kepatuhan terhadap syariah dalam platform *crowdfunding* sosial digital memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan integritas sistem. Ketika platform mengimplementasikan akad yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti menghindari unsur *gharar*, spekulasi, dan riba serta memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, kepercayaan masyarakat terhadap platform tersebut akan meningkat. Kepatuhan syariah juga menjamin bahwa seluruh proses penggalangan dan penyaluran dana berlangsung sesuai dengan ketentuan Islam sehingga dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk tujuan yang halal dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Jika terjadi ketidaksesuaian akad atau praktik yang tidak transparan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap platform yang pada akhirnya akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi digital. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan masalah hukum dan etika, serta merusak tujuan utama dari penggalangan dana sosial. Oleh karena itu, penegakan kepatuhan syariah dan penetapan akad yang tepat sangat penting untuk membangun ekosistem *crowdfunding* yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan di mata masyarakat. (Dontes Putra, 2024)

Rekomendasi dan Implikasi

Akad yang paling sesuai untuk platform *crowdfunding* sosial digital adalah akad *wakālah bi al-ujrah* dan *tabarru'*. Meskipun dalam hal ini platform kitabisa.com juga memberikan solusi lain dari akad *ijārah*, yaitu akad *wakālah bi al-ujrah*, namun dalam pelaksanaan akadnya terjadi di antara platform dan penggalang dana yang mengakibatkan adanya *gharar* karena upah yang diberikan bergantung pada ada atau tidaknya donatur.

Dalam hal ini, pengaplikasian Akad *wakālah bi al-ujrah* menjadikan platform sebagai *wakīl* (agen) yang diberi kuasa oleh donatur untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat dengan imbalan *fee* yang jelas (dalam bentuk nominal, bukan persentase) dan disepakati sebelumnya. Upah yang diberikan donatur diberikan diluar nominal yang akan diberikan pada penggalang dana, sehingga tidak tercampur dua model akad dalam satu transaksi. Adapun pertimbangan lainnya, akad *tabarru'* menjadi salah satu akad yang lebih relevan karena akad tersebut menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan merupakan sumbangan sukarela tanpa imbalan sehingga sangat sejalan dengan tujuan filantropi sosial. Penerapan kedua akad ini mencegah kebingungan antara transaksi komersial dan sosial, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan peran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana sosial. (Mufrih & Hadiroh, 2022)

Bagi regulator seperti DSN-MUI, sangat penting untuk menyusun fatwa yang lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital terutama yang berkaitan dengan akad dalam *crowdfunding* sosial. Fatwa yang ada saat ini perlu diperbaharui atau dilengkapi agar dapat secara spesifik mengatur mekanisme penggalangan dana sosial digital termasuk penetapan biaya, transparansi, serta

perlindungan hak-hak donatur dan penerima manfaat. Di samping itu, kerjasama antara DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri digital harus diperkuat untuk memastikan penerapan prinsip syariah dilakukan secara konsisten di lapangan. Bagi pengelola platform digital sangat penting untuk memilih dan menerapkan akad yang sesuai dengan misi sosial platform, meningkatkan transparansi biaya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme syariah yang diterapkan. Pengelola juga harus memastikan bahwa seluruh proses penggalangan dan penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, serta membangun sistem pengawasan internal yang solid untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah maupun etika.

Implementasi akad yang sesuai serta kepatuhan terhadap syariah pada platform *crowdfunding* sosial digital akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi dalam keuangan syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat nasional. Regulasi yang jelas dan responsif terhadap kemajuan digital akan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di kancah internasional. Peningkatan literasi syariah dan kerjasama antar sektor akan mempercepat transformasi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global sekaligus memperluas dampak sosial dan ekonomi dari gerakan filantropi digital yang berbasis syariah (Zubair, 2008).(Millah et al., 2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijārah* dan praktik yang diterapkan oleh platform *crowdfunding* sosial digital seperti *Kitabisa.com*, yang tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah* serta lebih cocok untuk transaksi komersial, bukan pengumpulan dana sosial. Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *tabarru'* dianggap lebih sesuai karena menekankan transparansi, kejelasan peran, dan tujuan sosial yang sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Penyesuaian akad dan regulasi sangat penting agar *crowdfunding* sosial digital tetap sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Pengawasan syariah yang ketat dan regulasi yang fleksibel diperlukan agar inovasi ekonomi digital tetap berkembang dengan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, S., & Susilawati, C. (2024). Online Donation for Charitable Giving: The Case of Yayasan Kebaikan Ummat. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1 SE-Articles), 61–71. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.848>
- Aprilio., A. F. F. U. (2024). Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi dan Security Pendonasian pada *Crowdfunding Kitabisa*. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(5).
- Aprilio, A. F., & Utami, F. (2024). Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi dan Security Pendonasian pada *Crowdfunding Kitabisa*. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5), 187–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adrg.v5i1.1813>

- Artado, A. (2023). Kontrak Ijarah Multisaja Dan Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Antara Teori Dan Praktik. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3 SE-Articles), 484–498. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.248>
- Ayunin, M. Q. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Kontraktor (Studi Kasus CV. PH) di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 528–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394>
- Dontes Putra. (2024). Implementasi Sharia Complaince dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia. *AL-MUTSLA*, 6(1 SE-Articles), 156–180. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>
- Efriadi, A. (2023). Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(II SE-Articles). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617>
- Fahrnisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01 SE-Articles). <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>
- Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., & Sapitri, Y. (2023). Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1 SE-Articles), 43–52. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26550>
- Fikriawan, S. (2018). Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa Pada Website Kitabisa. com). *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 181–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/elbarka.v1i2.1449>
- Gkevrou, M., & Stamovlasis, D. (2022). Illustration of a Software-Aided Content Analysis Methodology Applied to Educational Research. In *Education Sciences* (Vol. 12, Issue 5). <https://doi.org/10.3390/educsci12050328>
- Haerullah, Muhyidin, A., & Jupriyanto, M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso. *ESA*, 3(2 SE-), 1–14. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.21>
- Im, D., Pyo, J., Lee, H., Jung, H., & Ock, M. (2023). Qualitative research in healthcare: data analysis. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 56(2), 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.3961/jpmp.22.471>
- Millah, H., Najjiah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28–37.
- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297.
- Nirwan, F., & Yuletri, M. (2025). Digital Waqf: Innovation Or Distortion Of The Classic Waqf Concept? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 351–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.755>
- Nurhamdani, Asyifa Khumaira. Charis, Jessica Caroline. Gabriella, F. (2024). Exploring The Openness Of Participatory Space: Case Studies From Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 444–449. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1694>
- Ramdhani, N., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI

- tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Rasad Musfik R, Redi Gamsah M, Rifki Firmansyah, & Siti Maryam. (2023). Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi dan Tantangan di Era Digital. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(3 SE-Articles), 195–210. <https://doi.org/10.54783/jemba.v1i3.65>
- Suhadi. (2021). Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan BUMDes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1 SE-Articles), 51–65. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8180>
- Suliyono, S., Nurfaizi, A., & Saeful, A. (2024). Penerapan Akad Ijarah Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Transaksi Sewa Menyewa Air Conditioner Di Pt. Cahaya Manunggal. *Madani Syari'ah*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.613>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3390>
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 13(2), 229–246.
- Umardani, M. K. (2021). Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada AMMANA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1), 70–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1918>
- Zubair, M. K. (2008). Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 1–16.
- Zuheri, A. A., & Ghozali, M. L. (2025). Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 391–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1189>